

PENGARUH KARAKTERISTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KINERJA LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON

Nisrina Azmi Purnayudha, Paulus Theodorus Basuki Hadiprajitno¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The study tested the role of good corporate governance and environmental performance to carbon emissions disclosure in companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) of 2015 until 2019. The data used was 248 company. The testing of hypotheses using ordinary least square regression. On the other side, the f shows a model that is stable and significant. R-square is 13,63%, showing no other variables that can affect a model of 86,37%. The result of this research shows it has three variables without significant impact on carbon emissions disclosure is, board size, foreign diversity and age firms. On the other hand this research has live variable significant that is, independent commissioner and director, environmental performance, size firms and leverage. This outcome support previous studies Kılıc dan Kuzey (2019); Nasih et al., (2019); Setiawan dan Iswati (2019).

Keywords: Board Size, Independent Commissioner, Independent Director, Foreign Diversity, Environmental Performance, Carbon Emission Disclosure.

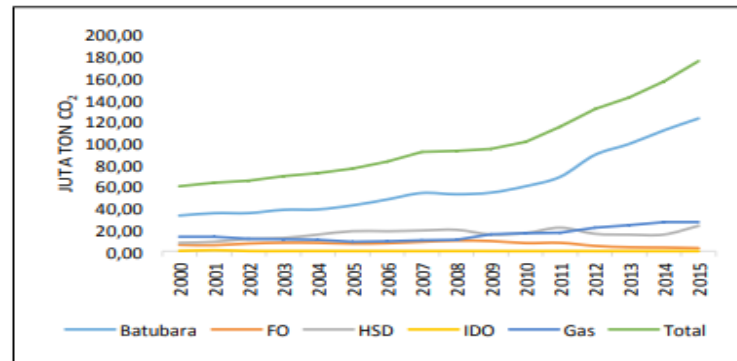
PENDAHULUAN

Di dalam perkembangan dan keberhasilan ekonomi saat ini, ada efek buruk yang tak terhindarkan dari penurunan kualitas lingkungan sejalan dengan pertumbuhan industri, retensi karbon, dan gas rumah kaca lainnya yang secara bertahap meningkat dari waktu ke waktu. Dampak yang paling nyata dari kedua situasi ini adalah pada lingkungan. Sebagai bentuk perhatian dunia terhadap permasalahan ini, maka diterbitkanlah Protokol Kyoto (1997) di Jepang yang mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional dimana sejumlah negara-negara yang meratifikasi protokol tersebut dan berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya. Perhatian ini juga didorong oleh pendapat masyarakat yang mendorong pemerintah agar mengambil tindakan terhadap isu global ini Pearce (2010) dalam Rankin et al (2011).

Berdasarkan hasil laporan kinerja lingkungan yang buat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2017) bahwa emisi GRK CO₂ di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan dimana tahun 2016 emisi GRK 75.663.410 ton CO₂. Sedangkan, tahun 2017 emisi GRK 33.626.184 ton CO₂ dan dikalkulasi mengalami penurunan sekitar -56%. Menanggapi hal ini, komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon sebagai bagian dari GRK sebanyak 26% pada akhir tahun 2020 yang bertujuan mencapai 0% emisi pada tahun 2050 terlihat dengan adanya Perpres No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres No. 71 Tahun 2011 mengenai penyelenggaraan inventarisasi gas rumah

¹ Corresponding author

kaca nasional. Pada pasal 4 Perpres No. 61 Tahun 2011 disebutkan bahwa pelaku usaha juga ikut andil dalam upaya penurunan emisi GRK. Artinya, akan ada tanggung jawab yang harus dilakukan atas permasalahan global warming yang dihasilkan oleh emisi karbon serta mengomunikasikan kontribusinya dalam bentuk sustainability report. Oleh karenanya, penting bahwa bentuk pengungkapan harus disertai dengan adanya kesadaran akan membuat kebijakan yang ramah lingkungan (Choi dkk, 2013).



Gambar 1. Emisi Gas Rumah Kaca Pembangkit Listrik. Sumber : www.esdm.go.id

Dengan adanya proses pertanggungjawaban maupun pengungkapan dalam sustainability report, penting bagi perusahaan untuk memiliki tata kelola perusahaan yang baik serta pengawasan yang ketat agar sesuai tujuan perusahaan dan harapan stakeholder. Misalnya, keberadaan anggota dewan independen dinilai peka terhadap ancaman-ancaman lingkungan seperti perubahan iklim serta memberikan wawasan dan perspektif baru yang terkait dengan pemangku kepentingan lingkungan dan sosial (Galbreath, 2010). Komposisi dewan juga memegang peran dalam pengawasan sebagaimana pada penelitian Dalton dkk, (2014) berpendapat bahwa ukuran dewan merupakan penentu tata kelola perusahaan yang penting dan efektif.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh (Kilic dan Kuzey, 2019) dan (Choi dkk, 2013). Diketahui bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon dengan menggunakan check list yang berdasarkan dari CDP (Carbon Disclosure Project) dikembangkan dalam lima kategori besar yang relevan dengan 18 items checklist indeks dengan perubahan iklim dan emisi karbon yang dikembangkan oleh Choi dkk, (2013), variabel tingkat emisi, ukuran perusahaan dan kualitas tata kelola perusahaan (Rankin dkk, 2011).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penelitian mengenai pengungkapan emisi karbon meningkat pesat seiring tingginya perhatian dunia terhadap perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan bisnis perusahaan, khususnya di Amerika Serikat, Kanada dan Australia. Di Indonesia sendiri, sedang mendapat perhatian lebih berkaitan dengan Pengungkapan Emisi Karbon sebagai salah satu upaya dan bentuk perhatian mendukung gerakan 0% emisi tahun 2050.

Dalam penerapan pengungkapan polusi sukarela dianggap akan membawa niat baik dalam ekonomi pasar, juga memfasilitasi pengungkapan informasi polusi secara sukarela untuk menyampaikan sinyal positif tentang kinerja masa depan perusahaan. Selain itu, pengungkapan emisi karbon adalah bentuk komunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan atas tanggung jawab sosialnya. Juga melibatkan anggapan bahwa perusahaan besar lebih sadar akan tanggung jawab lingkungan mereka dan lebih bersedia untuk mengungkapkan informasi karbon secara sukarela (Luo dkk, 2013).

Untuk membahas lebih lanjut, penelitian ini secara spesifik mengacu pada 2 teori utama yakni Stakeholder Theory dan Teori Legitimasi.

Stakeholder Theory

Stakeholder Theory menyatakan bahwa suatu entitas mencoba untuk menyelaraskan kegiatannya dengan harapan pemangku kepentingan (Barako dan Brown, 2008). Pemangku

kepentingan dalam memahami perusahaan di lingkungannya harus menjadi alat heuristik yang kuat, dimaksudkan untuk memperluas visi manajemen tentang peran dan tanggung jawabnya di luar fungsi maksimalisasi laba untuk memasukkan kepentingan dan klaim kelompok non pemilikan saham. Tekanan eksternal dari beberapa kelompok pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, organisasi non-pemerintah (NGO), media dan komunitas lokal, cenderung meningkat secara stabil dalam hal masalah lingkungan dan sosial (Lee dkk, 2015). Tekanan dari para pemangku kepentingan memaksa manajemen perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi dan karena itu, para pemangku kepentingan memiliki peran penting dalam pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan.

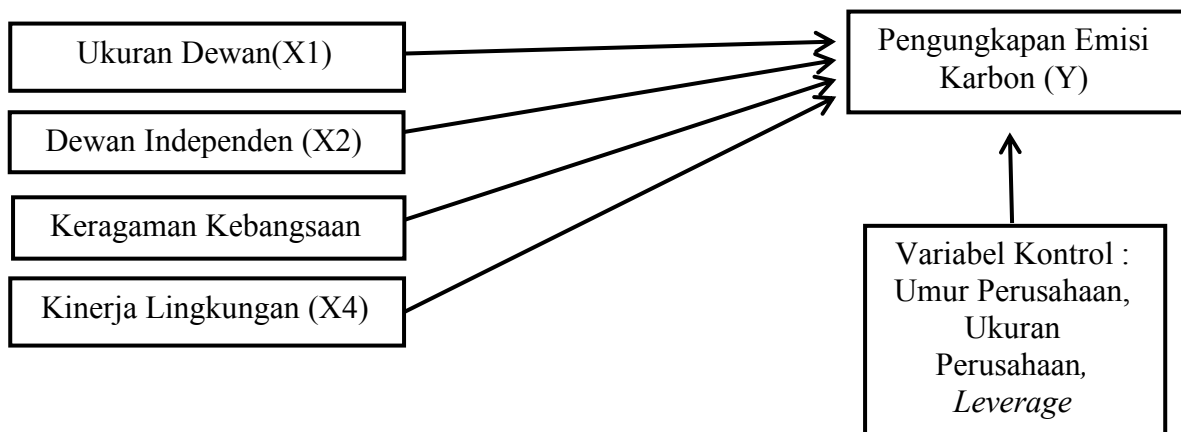
Teori Legitimasi

Organisasi yang ingin melakukan bisnis dalam suatu masyarakat perlu mendapatkan persetujuan dari para pemangku kepentingan utama dalam sistem sosial, agar ada persetujuan ini disebut legitimasi organisasi (Epstein, 1972). Ini menyatakan bahwa pengungkapan yang dilakukan perusahaan dibuat sebagai reaksi terhadap tekanan lingkungan (ekonomi, sosial, dan politik) dan untuk melegitimasi keberadaan serta perilaku perusahaan (Guthrie dan Parker, 1989) dan mendefinisikan "legitimasi" sebagai:

....a condition or status which exists when an entity' s value system is congruent with the value system of the large social system of which the entity is a part.

Teori Legitimasi mempertimbangkan interaksi antara organisasi dan masyarakat pada umumnya, teori ini dapat dikaitkan dengan konsep "kontrak sosial" (Choi dkk, 2013). Menurut (Mathews, 1995) berpendapat bahwa kontrak sosial ada antara organisasi dan anggota masyarakat individu asalkan masyarakat menawarkan organisasi dengan hak dan otoritas hukum untuk mengakses "sumber daya", seperti sumber daya alam atau manusia. Karena sumber daya tersebut penting untuk kelangsungan hidup mereka karena organisasi harus terus berupaya untuk memenuhi harapan masyarakat (konsisten dengan kontrak sosial) untuk memastikan operasi mereka tetap sah.

Kerangka Pemikiran Teoritis



Pengembangan Hipotesis

Praktik tata kelola perusahaan sangat penting ketika mempertimbangkan sejauh mana perusahaan proaktif dalam menangani perubahan iklim (Kiel dan Nicholson, 2005). (Rankin dkk, 2011) melaporkan bahwa perusahaan dengan struktur tata kelola yang kuat lebih proaktif dalam strategi pengungkapan karbon karena dapat mengelola masalah lingkungan dengan lebih baik dan memiliki perspektif yang lebih luas tentang manfaat jangka panjang yang akan diperoleh perusahaan dari pengungkapan lingkungan yang transparan.

Mempertimbangkan dinamika kelompok, dewan yang lebih kecil sering diharapkan lebih efektif dalam memonitor dan mengendalikan manajemen daripada dewan yang lebih besar (Jizi dkk, 2013). Karena ukurannya yang kecil, diharapkan dapat melakukan komunikasi dan koordinasi

yang lebih efisien, dan tingkat komitmen dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, dewan yang lebih besar lebih cenderung mengalokasikan sumber daya keuangan penting untuk mengejar lebih banyak inisiatif lingkungan (Nasih dkk, 2019) dan berbagai tekanan oleh para pemangku kepentingan yang menuntut menunjukkan tanggung jawab lingkungan kepada para pemangku kepentingan. Berbagai tekanan oleh para pemangku kepentingan yang menuntut untuk menunjukkan tanggung jawab lingkungan kepada para pemangku kepentingan, sesuai dengan *Stakeholder Theory*. Dengan demikian, hipotesis berikut :

H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kelebihan memiliki anggota dewan independen dalam perusahaan adalah mereka dapat meningkatkan nilai perusahaan yang jangka panjang dan membuat kegiatan pemantauan lebih efektif meningkatkan praktik tata kelola perusahaan serta memiliki pengaruh positif pada pengungkapan sukarela (Nasih dkk, 2019). Secara bersamaan, dijelaskan bahwa dapat mengurangi konflik keagenan dan menghasilkan pemantauan yang lebih baik, yang mengarah pada manajemen yang lebih baik (Nasih dkk, 2019). Kehadiran anggota dewan independen dalam dewan perusahaan dapat mengurangi konflik keagenan dan menghasilkan pemantauan yang lebih baik, yang mengarah pada manajemen yang lebih baik.

Meskipun demikian, keuntungan memiliki dewan independen dapat juga secara efektif diperoleh jika ada partisipasi investor institusional dalam kepemilikan perusahaan, karena mereka dapat meningkatkan nilai perusahaan dan membuat kegiatan pemantauan lebih efektif meningkatkan praktik tata kelola perusahaan dan memiliki pengaruh positif pada pengungkapan sukarela Ajinkya dkk, (2005); Bushee dan Noe, (2000); Chung dan Zhang, (2011). Namun, di Indonesia, keberadaan kepemilikan institusional relatif lebih lemah daripada di negara lain, meskipun ada tingkat konsentrasi kepemilikan yang lebih tinggi pada perusahaan (Darmadi dan Sodikin, 2013), dengan demikian, kepemilikan institusional tidak dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan praktik tata kelola perusahaan. Perusahaan dengan dewan yang lebih independen cenderung mengalihkan sumber daya ke arah adopsi Carbon Management System untuk melegitimasi operasi perusahaan dan untuk menunjukkan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan harapan masyarakat (Yunus dkk, 2016). sesuai dengan *Stakeholder Theory*. Dalam literatur diatas menunjukkan bahwa keberadaan dewan independen masih tidak konsisten terhadap pengungkapan sukarela. Dengan demikian, hipotesis berikut :

H2a : Komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

H2b : Direktur independen berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon

Penelitian (Kilic dan Kuzey, 2019) menyatakan bahwa keragaman kebangsaan memainkan peran penting dalam merespon pengungkapan emisi karbon serta menimbulkan kausalitas. Kausalitas keragaman dewan dianggap oleh Fields dan Keys, (2003) yang menemukan bahwa heterogenitas pengalaman, ide dan inovasi yang dibawa individu ke perusahaan berdampak pada kinerja perusahaan. Liao dkk, (2014) menemukan bahwa hubungan yang signifikan dan positif antara keragaman gender terhadap pengungkapan GRK. Dalam hal ini, diharapkan bahwa perusahaan dengan dewan yang keragam gender dan kebangsaan akan berhasil dalam memasukkan praktik pengurangan emisi karbon, serta mengkomunikasikan kegiatan mereka kepada para pemangku kepentingan, berdasarkan penjabaran diatas sesuai dengan *Stakeholder Theory*. Dengan demikian, hipotesis berikut :

H3 : Keberagaman Kebangsaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kinerja lingkungan merupakan salah satu ukuran bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Luo dkk, (2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan kinerja karbon yang lebih baik (yaitu dengan emisi rendah) cenderung mengungkapkan berita baik. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang buruk akan menahan pengungkapan dalam upaya untuk menghindari paparan negatif, sementara perusahaan dengan kinerja lingkungan yang bagus akan mencoba untuk membedakan diri dengan sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan mereka (Dawkins dan Fraas, 2011).

Pengungkapan yang dilakukan perusahaan yang berkinerja lingkungan yang baik dalam pengelolaan limbah akan menjadi kabar baik bagi para pemangku kepentingan dan mendapatkan

kepercayaan dari sebuah kelompok agar tetap harmonis. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan untuk mendapatkan dukungan *stakeholder* dan legitimasi masyarakat melalui program pemerintah PROPER. perusahaan dapat memperoleh lebih banyak perhatian dalam hal norma dan nilai sosial masyarakat, yang diharapkan membuat perusahaan lebih sah dalam berpartisipasi dengan program pemerintah, sesuai dengan pendekatan teori legitimasi. Dengan demikian, hipotesis berikut:

H4 : Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Seluruh data berupa angka. Model penelitiannya menggunakan model regresi berganda. Seluruh data akan diolah dengan software STATA 14

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu variable independen dan variable dependent. Variabel independen yang digunakan adalah Good Corporate Governance yang disajikan dalam 3 sub variable yaitu: Ukuran dewan, Dewan independen, Keragaman kebangsaan. Pengukuran variable independennya dilakukan sebagai berikut:

Ukuran dewan diukur dengan jumlah keseluruhan total anggota dewan pada perusahaan yang diadopsi dari penelitian (Jizi dkk, 2013; Kilic dan Kuzey, 2019; Yunus dkk, 2016).

Dewan independen mengacu pada persentase direktur independen (INDDIR) dan persentase komisaris independen (INDCOM). Pengukuran tersebut diadopsi dari penelitian (Nasih dkk, 2019; Harymawan, 2018).

Keragaman kebangsaan secara khusus menggunakan persentase keragaman gender (GENDR) dan persentase keragaman dewan asing (FOREIG) sebagaimana mengacu pada penelitian (Kilic dan Kuzey, 2019).

Kinerja lingkungan diukur menggunakan sertifikat penghargaan PROPER yang diberikan oleh Kemnterian Lingkungan Hidup dengan menggunakan indeks skor peringkat PROPER yang diadopsi dari penelitian Prafitri dan Zulaikha (2016) yaitu: Emas (sangat sangat baik, skor 5), Hijau (sangat baik, skor 4), Biru (baik, skor 3), Merah (buruk, skor 2), Hitam (sangat buruk, skor 1).

Variabel dependennya adalah Emisi Karbon yang diukur dengan proksi Carbon Emission Disclosure. Pengukuran Carbon Emission Disclosure dalam penelitian ini menggunakan item yang diadopsi dari penelitian Choi dkk, (2013) dan dikembangkan checklist berdasarkan informasi yang sesuai dengan CDP. yang dijabarkan menjadi 18 item indeks karbon.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 – 2019. Sampel adalah bagian dari populasi, sampel yang ada pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini berdasarkan pada kriteria tertentu antara lain:

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Perusahaan-perusahaan ini memiliki yang memiliki tanggung jawab mengungkapkan CSR. Sampel perusahaan tersebut terdiri dari pertambangan, pertanian, manufaktur dan energi. Perusahaan dipilih berdasarkan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011, Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011, dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup tahun 2009.
2. Perusahaan yang mendapatkan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup pada akhir tahun.
3. Perusahaan yang memiliki laporan tahunan secara konsisten yang dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia dan sustainability report untuk tahun 2015-2019.

4. Perusahaan yang secara implisit maupun eksplisit mengungkapkan emisi karbon mencakup minimal satu kebijakan yang terkait dengan emisi karbon atau gas rumah kaca atau mengungkapkan minimal satu item pengungkapan emisi karbon.

Model Penelitian dan Teknik Analisis

Model penelitian yang digunakan adalah Multiple regression analisis sebagai berikut:

$$CED = \alpha + \beta_1 BoardSize + \beta_2 INDDIR + \beta_3 INDCOM + \beta_5 FOREIG + \beta_7 KL + \beta_9 Age + \beta_{10} Sfirm + \beta_{11} Lev + \epsilon$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan tahunan secara konsisten pada tahun 2015 – 2019. Sampel dipilih dengan menggunakan purposive sampling yang telah dijabarkan pada bab 3. Adapun rincian dari pemilihan sampel tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Prosedur Pemilihan Sampel

No	Uraian	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data Penelitian
1	Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan secara konsisten di tahun 2015-2019	44	440
2	Perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria pada tahun 2015	-42	398
3	Perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria pada tahun 2016	-36	362
4	Perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria pada tahun 2017	-30	332
5	Perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria pada tahun 2018	-36	296
6	Perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria pada tahun 2019	-48	248
Total sampel penelitian			(248)

Statistik Deskriptif

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif untuk semua variabel dalam penelitian ini jumlah observasi ada 248 perusahaan. Jumlah maksimum dewan adalah 23 orang terdiri dari direktur dan komisaris. Nilai maximum INDCOM adalah 1,3 sedangkan nilai minimum 0%. Nilai maksimum INDDIR adalah 0,67. Skor pengungkapan carbon emisi pada sampe penelitian dengan nilai maksimum 0,778 dan nilai minimum perusahaan yang mengungkapkan carbon emisi pada laporan tahunan 0,056.

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif

	Obs	Mean	Median	Minimum	Maximum
Board Size	248	11.730	11	5	23
INDCOM	248	0.398	0.369	0	1.333
INDDIR	248	0.125	0.111	0	0.667
Foreign	248	0.197	0.125	0	1.000
KL	248	3.327	3	2	5

Age	248	47.278	44	9	118
Size	248	29.698	29.923	20.899	35.602
Lev	248	0.576	0.481	0.033	20.243
CED	248	0.233	0.222	0.056	0.778

Sumber : Data Output STATA, 2021

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dihasilkan nilai R-squared sebesar 0.1363. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variasi variabel independen dalam mempengaruhi atau menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0.1363 atau 13,63%. Sedangkan sisanya 86,37% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Hasil dari uji F atau uji simultan pada tabel 3 diperoleh nilai profitabilitas sebesar 0,0000. Hasil nilai F signifikansi $0.0000 < \text{tingkat signifikansi } 5\%$ maka model regresi memiliki tingkat kesesuaian model yang baik (goodness of fit).

Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Ordinary Least Square (OLS)

Carbon Emission Disclosure (CED)				
	Coef.	Std. Err.	t	P>t
BoardSize	-0.001	0.003	-0.51	0.614
INDCOM	-0.106	0.053	-2.02	0.045**
INDDIR	-0.189	0.060	-3.13	0.002***
Foreign	0.046	0.035	1.32	0.188
KL	0.042	0.015	2.90	0.004***
Age	-0.000	0.000	-1.00	0.317
Size	0.008	0.004	1.94	0.053*
Lev	0.010	0.006	1.68	0.094*
_cons	-0.072	0.126	-0.57	0.566
F	0.0000			
R- Sqaure	0.1363			
Adj R-Sqaure	0.1074			
N	248			

Notes : Signifikansi *10%, **5% dan ***1%

Sumber : Data Output STATA, 2021

Pengaruh Ukuran dewan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Hasil uji signifikansi Ukuran dewan yang diukur dengan dengan jumlah keseluruhan total anggota dewan pada perusahaan dengan memperoleh hasil koefisien negatif tidak signifikan dengan nilai sebesar $0,614 > 0,1$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi Ukuran dewan akan menurunkan pengungkapan emisi karbon. Pada hasil tersebut peran ukuran struktur dewan menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan tidak menempati peran penting dalam menentukan kebijakan pengungkapan emisi karbon secara sukarela, ukuran dewan yang lebih besar lebih cenderung mengalokasikan sumber daya keuangan penting untuk mengejar lebih banyak diluar inisiatif lingkungan dan semakin besar komposisi dewan dalam struktur perusahaan menjadikan pengawasan tersebut mengabaikan praktik berkaitan dengan faktor-faktor pengungkapan emisi karbon dalam ekonomi yang sedang tumbuh dalam suatu perusahaan, dengan adanya penugasan sebuah komite yang menangani masalah keberlanjutan perusahaan untuk terlibat dalam praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan untuk mengomunikasikannya melalui laporan

perusahaan mereka. Hasil ini sesuai dengan penelitian Kılıc dan Kuzey (2019); Ben-amar et al., (2017); Prado-Lorenzo dan Garcia-Sanchez (2010).

Pengaruh Dewan Independen terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Hasil uji signifikansi Independent Commissioner (INDCOM) yang diukur dengan jumlah komisaris independen dibagi dengan total jumlah komisaris dalam struktur perusahaan dengan memperoleh hasil koefisien negatif signifikan dengan nilai sebesar $0,045 < 0,05$. Sedangkan, uji signifikansi Direktur independen (INDDIR) yang diukur dengan jumlah direktur independen dibagi dengan total jumlah direktur dalam struktur perusahaan dengan memperoleh hasil koefisien negatif signifikan dengan nilai sebesar $0,002 < 0,01$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi INDCOM dan INDDIR akan menurunkan pengungkapan emisi karbon. Penelitian ini menemukan karena situasi yang terjadi di Indonesia dewan independen lebih konservatif dalam mengungkapkan informasi terkait emisi karbon kepada para pemangku kepentingan dan dalam pelaksanaan pengungkapan informasi terkait dengan emisi carbon tersebut memerlukan dukungan kebijakan resmi untuk emisi karbon. situasi tersebut dikarenakan direktur independent di Indonesia sebagian besar dipilih oleh pemegang saham yang memiliki kepemilikan tinggi untuk mewakili kepentingan mereka dan dapat memperoleh informasi secara langsung atau bukan melalui pengungkapan publik. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan Iswati dan Setiawan, (2020); Nasih et al., (2019a) dan Eng dan Mak (2003).

Pengaruh Keragaman Kebangsaan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Hasil uji signifikansi Keragaman kebangsaan (FOREIGN) yang diukur dengan jumlah anggota dewan asing dibagi dengan total keseluruhan jumlah anggota dewan komisaris distruktur perusahaan dengan memperoleh hasil koefisien positif tidak signifikan dengan nilai sebesar $0,118 > 0,1$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi Foreign tidak mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Dengan hasil ini, perlakuan entitas di Indonesia yang memiliki dewan yang beragam kebangsaan belum mampu untuk melibatkan praktik pengurangan emisi karbon dan mengungkapkan informasi terkait emisi karbon, ada beberapa kemungkinan entitas tersebut fokus pada aspek keuangan. Keberadaan dewan asing distruktur organisasi perusahaan belum dapat mengadopsi kepehaman yang dimiliki untuk menerapkan pada perusahaan yang baru mereka pimpin untuk memotivasi dan melaporkan informasi keterbaruan yang berkaitan dengan emisi karbon. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Kılıc dan Kuzey (2019).

Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Hasil uji signifikansi Kinerja Lingkungan yang diukur dengan skor peringkat Emas (sangat sangat baik, skor 5), Hijau (sangat baik, skor 4), Biru (baik, skor 3), Merah (buruk, skor 2), Hitam (sangat buruk, skor 1), dengan memperoleh hasil koefisien positif signifikan dengan nilai sebesar $0,004 < 0,01$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi Kinerja Lingkungan akan meningkatkan pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan dapat meningkatkan citra dan reputasinya dengan mengikuti PROPER. Perusahaan akan menunjukkan kepeduliannya dengan meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan dan informasi tentang kinerja perusahaan terkait dengan lingkungannya (Ulfa dan Ermaya, 2019). Penelitian Setiawan dan Iswati, (2019) menyatakan perusahaan yang proaktif berusaha untuk mengelola dan mengurangi risiko perubahan iklim dengan menerapkan strategi mengelola lingkungan dan kebijakan untuk menangani emisi gas dan mengembangkan inisiatif khusus bahwa keunggulan penghijauan akan mendapatkan tempat di masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada Prafitri dan Zulaikha, (2016); Setiawan dan Iswati, (2019).

Hasil regresi pada variabel kontrol pada penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sudah beroperasi lama kurang dapat bisa mengontrol polusi yang diakibatkan berasal dari kegiatan operasional. Ukuran perusahaan yang besar dan sumber daya yang memadai (SIZE) merespon positif dan signifikan terhadap praktik pengungkapan emisi karbon. Sedangkan, pada variabel Leverage mempunyai pengaruh terhadap praktik pengungkapan emisi karbon karena untuk melakukan pengungkapan sukarela secara detail dan memerlukan pengukuran alat juga membutuhkan pendaan dalam pengungkapan tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar mendapatkan bukti empiris berkenaan dengan apakah ukuran dewan, dewan independen, keberagaman kebangsaan dan kinerja lingkungan memengaruhi pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan yang termasuk dalam indeks di BEI tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris dan direktur independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Dan kinerja lingkungan, ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan, ukuran dewan, keragaman kebangsaan dan umur perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Keterbatasan

- Sampel yang sesuai dengan kriteria variabel penelitian tergolong sedikit.
- Beberapa perusahaan yang tidak konsisten mengikuti program PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Beberapa perusahaan tidak mengungkapkan emisi karbon secara rutin setiap tahunnya

Saran

- Memperluas sampel diluar perusahaan dipilih berdasarkan Peraturan Presiden No. 61/2011 dan Peraturan Presiden No. 71/2011
- Mengganti model penelitian.
- Menambah proksi dalam variabel moderasi atau regresi. Misalnya dengan Komite Lingkungan, Komite Keberlanjutan, kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

REFERENSI

- Barako, D. G., & Brown, Æ. A. M. (2008). Corporate social reporting and board representation : evidence from the Kenyan banking sector. *Journal Management & Governance*, 12, 309–324.
- Ben-amar, W., Chang, M. M., & Mcilkenny, P. (2017). Board Gender Diversity and Corporate Response to Sustainability Initiatives: Evidence from the Carbon Disclosure Project. *Journal of Business Ethics*, 142(2), 369–383.
- Choi, B. B., Lee, D., & Psaros, J. (2013a). An analysis of Australian company carbon emission disclosures. *Pacific Accounting Review*, 25(1), 58–79.
- Dalton, D. R., Daily, C. M., Johnson, J. L., Ellstrand, A. E., Dalton, D. A. N. R., & Daily, C. M. (2014). Number of Directors and Financial Performance: A Meta-Analysis. *The Academy of Management Journal*, 42(6), 674–686.
- Dawkins, C., & Fraas, J. W. (2011). Coming Clean : The Impact of Environmental Performance and Visibility on Corporate Climate Change Disclosure. *Journal of Business Ethics*, 100, 303–322.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.
- Eng, L. L., & Mak, Y. T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22, 325–345.
- Estélyi, K. S., & Nisar, T. M. (2016). Diverse boards : Why do firms get foreign nationals on their boards ? *Journal of Corporate Finance*, 39, 1–19.
- Fields, M. A., & Keys, P. Y. (2003). The Emergence of Corporate Governance from Wall

- St . to Main St .: Outside Directors , Board Diversity , Earnings Management , and Managerial Incentives to Bear Risk. *The Financial Review*, 38, 1–24.
- Freeman, R. E., & Reed, D. L. (1986). Stockholders and Stakeholders : A New Perspective on Corporate Governance. *California Management Review*, 25(3), 88.
- Goodstein, J., Guatam, K., & Boeker, W. (1994). The effects of board size and diversity on strategic change. *Strategic Management Journal*, 15, 241–250.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47–77.
- Hermawan, A., Aisyah, I. S., Gunardi, A., & Putri, W. Y. (2018). Going Green : Determinants of Carbon Emission Disclosure in Manufacturing Companies in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 8(1), 55–61.
- Iswati, S. (2018). Carbon Accounting Reflection as a Response to Face the Climate Change. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 98, 15–18.
- Jackson, R. B., Canadell, J. G., Fuss, S., Milne, J., Nakicenovic, N., & Tavoni, M. (2017). Focus on negative emissions. *Environmental Research Letters*, 12(11).
- Jizi, M., Salama, A., Dixon, R., & Stratling, R. (2014). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure : Evidence from the US Banking Sector Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure : Evidence from the US Banking Sector. *Journal of Business Ethics*, 125(4), 601–615.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Data Inventory Emisi GRK Sektor Energi*; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: Jakarta, Indonesia, 2016. Available online: <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-data-inventory-emisi-grk-sektor-energi-.pdf> (accessed on 21 Februari 2021)
- Kiel, G. C., & Nicholson, G. J. (2005). Evaluating Boards and Directors. *Corporate Governance: An International Review*, 13(5), 613–632.
- Kilic, M., & Kuzey, C. (2019). The effect of corporate governance on carbon emission disclosures Evidence from Turkey. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, 11(1), 35–53.
- Liao, L., Luo, L., & Tang, Q. (2014). Gender diversity , board independence , environmental committee and greenhouse gas disclosure. *The British Accounting Review*, 30, 1–16.
- Lorenzo, J. M. P., Sánchez, I. M. G., & Gallego-Álvarez, I. (2009). Características del consejo de administración e información en materia de Responsabilidad Social Corporativa. *Revista Española De Financiación Y Contabilidad*, 38(141), 107–135.
- Luo, L., Tang, Q., & Lan, Y.-C. (2013). Comparison of propensity for carbon disclosure between developing and developed countries A resource constraint perspective. *Accounting Research Journal*, 26(1), 6–34.
- Mathews, M. R. (1995). Social and Environmental Accounting : A Practical Demonstration of Ethical Concern ? *Journal of Business Ethics*, 14, 663–671.
- Mitchell, R. K., & Wood, D. J. (1977). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience : Defining the Principle of Who and What Really Counts. *The Academy of Management Review*, 22(4), 853–886.
- Nasih, M., Harymawan, I., & Paramitasari, Y. I. (2019). Carbon Emissions , Firm Size ,

- and Corporate Governance Structure : Evidence from the Mining and Agricultural Industries in Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 11(9). <https://doi.org/10.3390/su11092483>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.
- Prafitri, A., & Zulaikha. (2016). Analisis Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 13(2), 155–175.
- Prado-Lorenzo, J.-M., & Garcia-Sanchez, I.-M. (2010). The Role of the Board of Directors in Disseminating Relevant Information on Greenhouse Gases. *Journal of Business Ethics*, 97, 391–424
- Rankin, M., Windsor, C., & Wahyuni, D. (2011). An investigation of voluntary corporate greenhouse gas emissions reporting in a market governance system Australian evidence. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 24(8), 1037–1070.
- Setiawan, P., & Iswati, S. (2019). Carbon Emissions Disclosure, Environmental Management System, and Environmental Performance: Evidence from the Plantation Industries in Indonesia. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, 3(2), 215. <https://doi.org/10.28992/ijSAM.v3i2.99>
- Yunus, S., Elijido-Ten, E., & Abhayawansa, S. (2016). Article information : *Managerial Auditing Journal*, 31(2), 156–179.